DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK

DOKUMEN REVIEW RENCANA STRATEGIS

Tahun 2021-2026





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI. Dr. Wahidin SH No. 241 Telp-Fax. (031) 3951240 e-mail : kbpp@gresikkab.go.id G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS KBPPPA KEBUPATEN GRESIK

Menimbang

 Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat
 (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat
 1 : "Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah yang bersifat indikatif."
 - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 1 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
 Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
 Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
- 4. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI nomor : 239/XI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021. tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

DINAS KBPPPA KABUPATEN PERATURAN KEPALA GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2026

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KBPPPA

KABUPATEN GRESIK

BAB III : ISU-ISU BERDASARKAN STRATEGIS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN,

> INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN

2021 - 2026

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal: 19 Nopember 2022

KEPALA DINAS KBPPPA

Pembina NIP. 19740825 200604 2 016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2021 -2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2021 -2026 berisi arah kebijakan, program dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2021 -2026 sesuai dengan visi dan misi Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024 dan telah disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2021 -2026 ini dapat menjadi bahan penunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021 -2026.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal: 19 Nopember 2022

KABUPATEN GRESIK

THAS KELLINGS DESERVAN

OR HIME KHOIROH, M.Kes

NIP. 19740825 200604 2 016

DAFTAR ISI

KATA P	ENGA	NTAR	i
DAFTAF	R ISI		iii
DAFTAF	R GAM	BAR	V
DAFTAI	R TABI	EL	vi
			_
BAB I		DAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAM	BARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan, dan Perlindungan Anak	8
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	14
BAB III	I ISU	-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS	
	DAN	N FUNGSI	19
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
		Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	
		Keluarga Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan, dan Perlindungan Anak	19
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program	
		Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	21
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	22
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang	
		Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	31

BAB IV	TUJU	JAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	34
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan, dan Perlindungan Anak	34
	4.2	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	35
BAB V	RENG	CANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINER	JA,
	KELO	MPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	. 39
BAB VI	INDI	KATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG	
	MEN	GACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
BAB VII	PENU	JTUP	. 54
	7.1	Pedoman Transisi	54
	7.2	Kaidah Pelaksanaan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas						
	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,						
	dan Perlindungan Anak	2					
Gambar 2.1	Struktur organisasi organisasi Dinas Keluarga Berencana,						
	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9					

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	di Perangkat Daerah Tahun 202115
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
	di Perangkat Daerah Tahun 202115
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
	di Perangkat Daerah Tahun 202116
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana,
	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten
	Gresik Tahun 2021-2026
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
	Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun
	2021-2026
Tabel 3.1	Sasaran strategis Renstra BKKBN Provinsi
Tabel 3.2	Sasaran strategis Dinas Perlindungan Perempuan &
	Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian indicator Nasional, Provinsi
	dan Kabupaten 33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
	dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas
	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
	danPerlindungan Anak Tahun 2021-2026
Tabel 5.1	Program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
	dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 42
Tabel 5.2	Kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
	dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 45

Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana,						
	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						
	yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD						
	Tahun 2021-2026	53					

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Peraturan Bupati Gresik tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Gresik, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gresik.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

dan Renstra SKPD Provinsi Perumusan visi dan misi SKPD Rancangan Renstra-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda Perumusar Strategi dan kebijakan Perumusan Tujuan Perumusan rencana kegiatan indikator kinerja, kelompok sasarar dan pendanaan indikatif berdasarkan Penelaahai KLHS tusi Rancangan Renstra-SKPD rencana program prioritas RPJMD Pendahuluan
Gambaran pelayanan SKPD
isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi
visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan
rencana program, kegiatan,
indikator kimerja kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kimerja SKPD yang
mengacu pada tujuan dan Analisis Gambaran pelayanan SKPD Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasara RPJMD **SPM** mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. informas

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
 Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 219 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 No. 6)
- 22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik) Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48)
- 23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB II

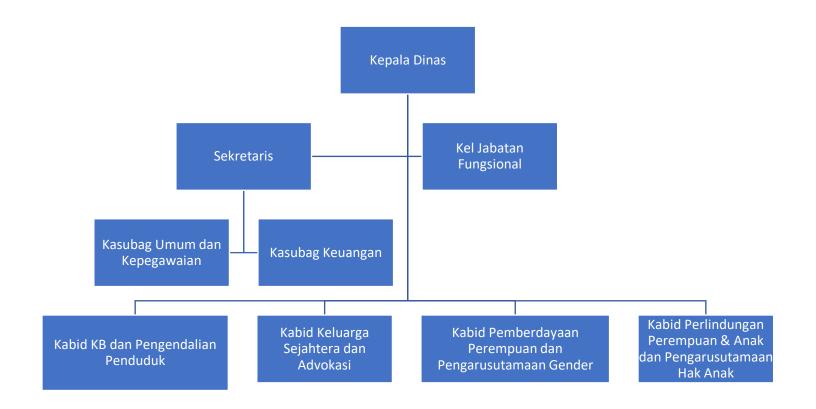
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi;
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- f. Bidang Perlindungan Perempuan & Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1 Struktur organisasi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Seretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Perbup No.69 tahun 2021, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasin dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelayanan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang keluarga sejahtera dan advokasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Perbup No. 69 Tahun 2021, Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program

dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan dan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan advokasi; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Perbup No. 69 tahun 2021, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatandi bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Keluarga Bererncana dan Pengendalian Penduduk;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;

- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Perbup No. 59 tahun 2021, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Perbup No. 69 Tahun 2021, Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang
 Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Guna melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021, dibawah ini diuraikan jumlah tenaga yang dimiliki sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Th. 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS /	CPNS	Non	PNS	Jumlah
110	Imgkat I chalaikan	L	P	L	P	Juillali
1	SD	1	ı	1	ı	0
2	SMP Sederajat	-	1	1	-	0
3	SMA Sederajat	2	4	5	8	18
4	D3	-	-	-	17	17
5	D4	-	-	-	1	1
6	S1	4	10	8	13	35
7	S2	2	5	ı	1	7
8	S3	-	ı	1	-	0
Jumlah		8	19	13	38	78

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah			
1	Golongan II	-	4	4			
2	Golongan III	5	8	13			
3	Golongan IV	3	7	10			
	Jumlah	8	19	27			

Sementara jumlah pegawai dilihat dari pangkat dan golongan dapai diuraikan bahwa pegawai yang memiliki golongan II sebanyak 14,81%, pegawai yang memiliki golongan III sebanyak 48,14%, dan pegawai yang memiliki golongan IV sebanyak 37,03%. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas golongan yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah golongan III sebanyak 48,14%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak guna menunjang tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Th.2021

No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah		Ket		
	Yang Digunakan	Juiillaii	Lengkap	Kurang	Cukup	
1.	Ruang Kerja	18		$\sqrt{}$		
2.	Meja/Kursi Kerja	48		$\sqrt{}$		
3.	Komputer	22		$\sqrt{}$		
4.	Kendaraan Operasional	9	2/			
	Roda 4		V			
5.	Kendaraan Operasional	173	2/			
	Roda 2		\ \ \			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masih dalam keadaan kurang di bidang selain transportasi. Namun di bidang transportasi, keadaannya sudah lengkap dan mencukupi.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 (Renstra Periode yang Lalu)

				Target Renstra Perangkat Daerah						Rea	alisasi Capa	ian		Rasio Capaian					
NO	Indikator Kineria	Satuan	Satuan	Target IKK		pa	da Tahun l	ce-			pa	da Tahun l	ce-			pada	a Tahun ke) -	
			IKK	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Unmeet Need pelayanan ber- KB	%	9,7	10,54	10,25	10,12	9,9	9,8	19,01	15,6	7,33	13,87	11,57	55,44	65,71	138,06	71,38	84,70	
2	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan	%	1/5	1/4	1/3	1/3	1/2	1/2	1/5	1/6	1/6	1/6	1/5,5	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
3	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,07	1,07	1	0,9	0,8	0,7	0,86		0,49	0,77	0,55	124,42	n/a	183,67	103,90	127,27	
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	indikator	-	-	-	17	19	20	-	-	17	19	-	-	-	100,00	100,00	N/A	
5	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PZT-P2A);	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan Pemerintah Daerah (IDG)	%	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	32	24,66	26,6	30	36,35	106,67	82,20	88,67	100,00	121,17	

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (Renstra Periode yang Lalu)

Box waster		Ar	nggaran pada Tahur	ı ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
Program	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2011	2012	2013	2014	2015		
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	694.980.000,00	1.214.537.200,00	889.778.000,00	1.499.119.600,00	477.760.116,00	675.956.000,00	982.476.883,00	849.587.735,00	1.137.689.513,00	324.834.144,00	97,26	80,89	95,48	75,89	67,99		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	55.000.000,00					55.000.000					100						
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	271.200.000,00					271.200.000					100						
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	318.780.000,00	545.562.000	412.716.000	940.259.200	315683091	299.756.000	479.100.983	403.080.735	674.573.090	168.572.744	94,03	87,82	97,67	71,74	53,40		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	50.000.000,00					50.000.000					100						
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan		668.975.200	477.062.000	558.860.400	162077025		503.375.900	446.507.000	463.116.423	156.261.400		75,25	93,60	82,87	96,41		
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	6.124.349.200,00	6.615.657.200,00	10.950.598.787,00	12.447.360.419,00	11.485.012.571,00	5.735.770.689,00	5.998.671.306,00	8.837.797.092,00	10.676.633.540,00	9.539.135.224,00	93,66	90,67	80,71	85,77	83,06		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	613.032.200,00	545.026.000	871.561.787	1.530.405.000	1.619.840.845	597.720.343	464.996.256	793.740.147	1.400.602.601	1.511.757.904	97,50	85,32	91,07	91,52	93,33		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650.000.000,00	741.000.000	346.746.000	366.979.594	490.438.210	646.693.000	703.500.500	327.548.061	238.356.005	469.025.502	99,49	94,94	94,46	64,95	95,63		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.700.000,00	10.000.000	9.600.000	19.444.400	6.977.727	37.700.000	6.260.000	6.438.000	8.860.635	6.288.863	100,00	62,60	67,06	45,57	90,13		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.030.000,00	99.826.000	33.945.000	41.418.300	19.884.274	64.030.000	95.632.600	33.105.000	39.401.927	7.726.459	100,00	95,80	97,53	95,13	38,86		
Program Keluarga Berencana	580.237.000,00	1.375.177.700	5.873.827.000	6.347.483.600	5.979.691.150	576.547.000	1.181.542.850	3.928.304.084	4.871.379.022	4.346.042.006	99,36	85,92	66,88	76,75	72,68		
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.608.420.000,00					1.600.420.000					99,50						
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	39.740.000,00					39.740.000					100,00						
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	20.062.500,00					20.062.500					100,00						
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	169.641.500,00					169.391.500					99,85						
Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU	25.000.000,00					23.380.000					93,52						
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Keluarga Berencana	2.316.486.000,00					1.960.086.346					84,61						
Program Keluarga Sejahtera		3.737.627.500	3.752.454.000	4.076.473.325	3.346.230.365		3.441.939.100	3.686.196.800	4.055.597.150	3.177.094.490		92,09	98,23	99,49	94,95		
Program Pengendalian Penduduk		107.000.000	62.465.000	65.156.200	21.950.000		104.800.000	62.465.000	62.436.200	21.200.000		97,94	100,00	95,83	96,58		
	6.819.329.200,00	7.830.194.400,00	11.840.376.787,00	13.946.480.019,00	11.962.772.687,00	6.411.726.689,00	6.981.148.189,00	9.687.384.827,00	11.814.323.053,00	9.863.969.368,00	94,02	89,16	81,82	84,71	82,46		

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalah yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Permasalahan terkait kepegawaian:
 - Belum ada mekanisme rekrutmen serta manajemen kepegawaian untuk tenaga non pns pendamping kasus untuk menjalankan tugas dan fungsi perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan. Layanan ini membutuhkan SDM dengan kualifikasi dan pembiayaan yang khusus;
 - Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik memiliki kader di setiap RW, namun belum memiliki mekanisme yang efektif untuk transfer informasi dan peningkatan kapasitas;
- b. Permasalahan terkait Keluarga Berencana:
 - 1) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) 13,88% (Target SPM 5 %)
 - 2) Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19,5% (Target SPM 25 %)
 - 3) Presentase Peserta KB Baru Pria 2,27 % (Target SPM 3,1 %);
- c. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk:
 - Rasio petugas penyuluh KB belum sesuai dengan SPM. 1 PKB berbanding 4-5 desa / kelurahan. SPM 1 PKB berbanding 1-2 desa / kelurahan
- d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera:
 - 1) Masih tingginya cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
 - 2) Belum tercapainya cakupan anggota BKB, BKR, BKL dalam rangka program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
 - 3) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan Keluarga

- e. Permasalahan terkait Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan:
 - Jumlah anggaran Perangkat Daerah yang sudah responsive gender belum mencapai 30% dari APBD;
 - 2) Jumlah desa yang melibatkan kelompok perempuan dalam musrenbang desa belum mencapai 30% dari jumlah desa;
 - 3) Usulan perempuan sebagaimana disusun dalam musrenbang perempuan belum diakomodasi dalam perencanaan regular. Belum ada mekanisme untuk mengintegrasikan hasil musrenbang perempuan kedalam penentuan kegiatan prioritas;
 - 4) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
 - 5) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- f. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:
 - Belum ada SOP Terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - 2) Belum ada shelter yang layak sebagai tempat tinggal sementara perempuan dan anak yang menjadi dampingan dinas;
 - 3) Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak belum memiliki unit teknis yang berbentuk UPT;
 - 4) Belum ada mekanisme pembiayaan dan kepegawaian terkait operasional layanan;
 - 5) Kabupaten Gresik belum memenuhi indicator yang dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak;
 - 6) Masih terjadi perkawinan anak;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Visi tersebut dituangkan dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkannya. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Adapun keterkaitan dinas dengan pencapaian misi dan visi tersebut adalah pada:

- 2.1. Misi 2, terkait dengan sasaran kelima tujuan kedua, yang berbunyi mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan. Peran dinas adalah mewujudkan kesetaraan akses pembangunan yang setara bagi perempuan dan laki-laki serta anak-anak;
- 2.2. Misi 4, tujuan keempat, sasaran ketujuh, yang berbunyi meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Peran dinas terkait dengan penyelenggaraan layanan perencanaan kelahiran, kesehatan reproduksi terkait kontrasepsi, serta perencanaan keluarga;
- 2.3. Misi 5, terkait dengan perlindungan social. Peran dinas menyelenggarakan layanan perlindungan khusus bagi anak, serta bagi korban kekerasan berbasis gender.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BKKBN dan Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

Sasaran Strategis Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024

Dalam Renstra BKKBN 2020- 2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

2. Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Dalam Renstra Kemepppa Tahun 2020- 2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai, menurut tujuannya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan
 TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

1) Sasaran Strategis Renstra BKKBN Provinsi

Tabel 3.1 Sasaran strategis Renstra BKKBN Provinsi

No	Indikator	Baseline		Ta	rget Ta	hun	
110		Duscinic	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.08	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83
2	Prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	63,1	65,24	65,66	66,08	66,5	67,04
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.7	7.54	7.36	7.18	7	6,84
4	Angka Kelahiran Remaja 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	31	30	26	25	22	44
5	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh Wanita usia 25-49 tahun	21 (SKAP 2019)	20,9	21	21	21	21
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		51,11	52,47	54,38	56,29	28,2

2) Sasaran Strategis Renstra Dinas Perlindungan Perempuan & Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.2 Sasaran strategis Dinas Perlindungan Perempuan & Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran	Indikator	Baselin e 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Meningkatnya komitmen Pembangunan Responsif	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,71	70,57	70,97	71,37	71,77	72,17
	Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	41,9	47	50	55	60	65
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan						
	dan perlindungan perempuan	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak	84.21%	86,84 %	89,47 %	89,47 %	94,73	100 %
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan KB Aktif (CPR)	75, 86 %	75, 9 %	76,15 %	76,4 %	76,65 %	76,90 %
		Persentase Data Penduduk yang Akurat	99.70%	99,75 %	99,8%	99,85 %	99,90 %	99,95 %

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RT/RW kabupaten Gresik dilakukan dengan berazaskan kaidah kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan wawasan perlindungan terhadap sumberdaya yang dimiliki daerah.

RT/RW kabupaten juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan berhasil gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas.

Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik adalah tersedianya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2009-2029 serta tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2029.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu:

- 1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah ;
- 2. Sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
- 3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah Kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sector;
- 4. Sebagi alat untuk mengaokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- 6. Sebagai dasar pengendali pemanfaatan ruang;
- 7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2019 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang

untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan kota baik terhadap aspek social ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan kota dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan kota yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu kota. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang berdampingan dengan kota Surabaya, Surabaya yang merupakan ibukota di Propinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25 km². Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kabupaten Gresik telah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan tata guna lahan di Kabupaten Gresik. Perkembangan Kabupaten Gresik yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Kabupaten Gresik memiliki posisi yang strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa RTRWN Kabupaten Gresik merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Kabupaten Gresik memiliki kebijakan struktur ruang untuk memantapkan Kabupaten Gresik sebagai PKN, mengembangkan Kabupaten Gresik sebagai Pusat pelayanan Berskala Regional dan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kab. Gresik. Kebijakan struktur ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, dimana Kabupaten Gresik dibagi menjadi 18 kecamatan.yang mana dua kecamatan berada di kepulauan bawean, dengan fungsi dan peran masing-masing.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan KBPP kab. Gresik memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode analisa sederhana, dengan membandingkan:

- Capaian indikator sebagaimana sasaran strategis BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta target RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, pada angka capaian tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan / atau angka capaian antar waktu;
- 2. Capaian indikator sebagaimana sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan indikator RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, pada angka capaian tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan / atau angka capaian antar waktu.

Dari itu didapatkan:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian indicator Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Indikator	Capaian Nasional Tahun 2020	Capaian Provinsi Tahun 2020	Capaian Kabupaten Tahun 2020	Sumber Data
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.26%	1.97 (Tahun 2019)	2.03 (Tahun 2020)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2021
Cakupan KB Aktif (CPR)	N/A	75.55% (Tahun 2020)	76.53% (Tahun 2020)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2021
kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed	8.6%	9.52 (Tahun 2020)	11.48 (Tahun 2020)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun Terbit 2021
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19	25 per-1.000 kelahiran	24.60 (Tahun 2020)	7.93 (Tahun 2019)	BKKBN. Buku Saku Parameter Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tahun

Indikator	Capaian Nasional Tahun 2020	Capaian Provinsi Tahun 2020	Capaian Kabupaten Tahun 2020	Sumber Data
tahun/Age				Terbit 2021
SpecificFertilityRatio				
(ASFR)				
Indeks Pembangunan		51.11		
Keluarga (iBangga)	53.57%	(Target		blm tersedia
		2020)		
		16.92		BKKBN. Buku Saku
Median Usia Kawin	21.9%	(Tahun	20 (Tahun	Parameter Kependudukan
Pertama (MUKP)		2019)	2019)	Provinsi Jawa Timur. Tahun
				Terbit 2020
	91,07 (Tahun			
	2019)			
	Sumber:			
	kemenpppa.			
Indeks Pembangunan	Pembangunan .	91.07	89.93	BPS
Gender (IPG)	manusia			
	berbasis			
	gender.			
	Tahun Terbit			
	2020			
	75,24 (Tahun			
	2019)			
	Sumber:			
	kemenpppa.			
Indeks Pemberdayaan	Pembangunan .	73,03	63,29	BPS
Gender (IDG)	manusia			
	berbasis			
	gender.			
	Tahun Terbit			
•	2020			
proporsi perempuan	10,35%	10,67%	N/A	BPS
usia 20-24 tahun				

Indikator	Capaian Nasional Tahun 2020	Capaian Provinsi Tahun 2020	Capaian Kabupaten Tahun 2020	Sumber Data
menikah < usia 18				
tahun				
persentase anak				
berusia 10-17 tahun	0,0325	2,59%	N/A	BPS
yang bekerja				
Nilai SAKIP	N/A	82.38	81.31	https://sakip.gresikkab.go.id/
Persentase Anggaran		47		Laporan Penyelenggaraan
Responsif Gender	N/A	(Target	0.517	Pemerintahan Daerah
(ARG)		2020)		(LPPD)
Persentase		100%		
Penanganan	N/A		N/A	
Perempuan Korban	IN/A	(Target	IN/A	
Kekerasan		2020)		
Persentase		100%		
Penanganan Anak	N/A	(Target	N/A	
Korban Kekerasan		2020)		
Dorgantaga Vahunatan		86.84%		
Persentase Kabupaten	N/A	(Target	N/A	
/ Kota Layak Anak		2020)		
Persentase Data		99.75%		
	N/A	(Target	N/A	
Penduduk yang Akurat		2020)		

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

- Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatkan Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter
- Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan
 Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Tuivan	Indikator	Kondisi Awal	Target Indikator					i Akhir	
Tujuan	Kinerja Utama	Kondis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90,03	90,96	91,12	91,86	92,42	93,04	93,64	93,64
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	64,2	65,3	67,6	69,3	70,2	73,3	73,3	
	Prevalensi Stunting	12	12-11	11-10	10-9	9-8,5	8,5-7	7	7
Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	%59'69	>75%	%08<	>85%	%06<	%56<	>100%	>100%

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan actor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menunjukkan bagaimana cara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Menyusun peraturan bupati sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor
 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Menyusun mekanisme rekrutmen dan kualifikasi pendamping kasus untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 3. Membangun Shelter;

- 4. Membangun ruang konsultasi yang layak;
- Melakukan crosscutting kegiatan dinas melalui program unggulan Bunda Puspa;
- 6. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan
- 7. Melakukan pengutanan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak anak
- 8. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya
- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- Pemantapan fungsi koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KB
- 2. Perekrutan tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB baik PNS maupun honorer
- 3. Meningkatkan sarana prasarana penyuluhan KB bagi PUS
- 4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
- 5. Mengoptimalkan peningkatan pengarusutamaan hak anak
- 6. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan
- 7. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan	Indeks	Meningkatkan kualitas	Persentase desa yang
kesetaraan akses	Pembangunan	dan aksesibilitas	telah
pembangunan bagi	Gender	pelayanan dasar secara	mengakomodasi usulan
semua golongan		inklusif dan	perempuan
		berkeadilan gender	Persentase PD yang
			minimal 30%
			kegiatannya dilengkapi
			dokumen Analisa
			Responsif Gender
			(ARG)
Meningkatnya	Indeks	Peningkatan Peran dan	Total Fertility Rate
Kualitas	Pembangunan	Fungsi Keluarga dalam	(TFR)
Penyelenggaraan	Kesehatan	Pembangunan	Contraceptive
Layanan	<u>Masyarakat</u>	Daerah, Inisiasi Nilai-	Prevalency Rate (CPR)
Pendidikan dan	Prevalensi	Nilai Luhur Budaya	Persentase Usia Kawin
Kesehatan	Stunting	Gresik dan Pembinaan	Pertama dibawah 20
		Karakter	Tahun
Terserapnya Tenaga	Cakupan	Mewujudkan Layanan	Persentase Kasus
Kerja Warga Gresik	Perlindungan	Komprehensif untuk	Kekerasan terhadap
Yang Berdampak	Sosial Warga	Kasus Kekerasan	Perempuan yang
Pada	Miskin	Berbasis	Mendapat
Penanggulangan		Gender dan Anak Yang	Layanan Komprehensif
Kemiskinan		Memerlukan	Persentase Kasus Anak
		Perlindungan Khusus	dalam Situasi Khusus
			yang Mendapat
			Layanan Komprehensif
			Tingkat Kematangan
			Layanan sesuai Standar
			SPBE

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Program,kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,bahwa program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya pemerintah kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas dan berkeadilan gender tahun 2021. Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota
- 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kualitas penduduk
- 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

I. PROGRAM EMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

J. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 5.1 Program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		735.061.000	644.284.000	706.692.000	861.477.000	975.381.000	684.669.000				
Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	0	0%	15%	20%	25%	30%	35%				
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		585.372.000	689.422.000	709.057.000	780.854.000	865.714.000	956.146.000				
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan		96%	96%	96%	96%	96%	96%				
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		387.079.000	7.815.969.000	779.369.000	830.456.000	889.000.000	946.028.000				
Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya			10%	10%	10%	10%	10%				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		9.677.000	39.080.000	500.345.000	533.143.000	570.727.000	607.338.000				

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target									
	awai	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak			50%	60%	70%	80%	90%				
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		397.133.000	518.743.000	586.814.000	695.404.000	840.014.000	983.290.000				
Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak		114%	120%	130%	140%	140%	140%				
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		210.399.803	539.567.500	421.369.776	472.654.571	543.704.353	598.074.789				
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Berhasil Diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.718.115.000	5.699.819.000	6.419.491.000	7.520.161.000	8.850.886.000	10.355.793.000				
Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi			10%	10%	10%	10%	10%				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		696.740.000	109.424.000	120.023.000	140.680.000	165.657.000	914.930.000				

Program/ Indikator	Target awal	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		7.634.782.000	4.808.965.000	5.231.915.000	6.132.351.000	7.221.122.000	8.452.781.000			
Unmet Need ber-KB		11%	10,5%	10%	9,6%	9%	8,5%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.316.338.000	2.074.503.000	2.275.448.000	2.667.062.000	3.140.587.000	3.676.256.000			
Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri	3%	6,16%	7%	8%	9%	10%	11,0%			

Tabel 5.2 Kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Program	Kegiatan	Indikator	Target		Kera	ngka Pendanaar	ı Indikatif dan T	arget	
riogram	Kegiatan	murkator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM	Pelembagaan			96.769.550	156.319.406	171.461.147	209.015.858	236.651.816	166.117.817
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya		5 OPD	10 OPD	15 OPD	30 OPD	45 OPD	55 OPD
	Pemberdayaan			1.095.667.785	331.645.187	363.769.705	443.445.284	502.077.367	352.433.366
	Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes		15 DESA	17 DESA	30 DESA	45 DESA	50 DESA	65 DESA
	Penguatan dan			145.154.131	156.319.406	171.461.147	209.015.858	236.651.816	166.117.817
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi		10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA
				-	18.173.825	19.941.117	23.381.446	27.542.830	28.107.623

Duaguan	Vaciatan	Indikator	Target		Kera	ngka Pendanaar	ı Indikatif dan T	arget	
Program	Kegiatan	Indikator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.		30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD
	Penyediaan			469.059.667	485.855.035	485.694.405	518.955.906	557.203.800	518.425.691
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil diselesaikan		115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS	115 KASUS
	Penguatan dan			116.312.333	185.393.140	203.421.478	238.516.648	280.967.370	409.612.686
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi			10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA
				387.079.000	7.815.969.000	779.369.000	830.456.000	889.000.000	946.028.000

Duaguan	Vaciatan	Tudiliotou	Target		Kera	angka Pendanaar	ı Indikatif dan T	arget	
Program	Kegiatan	Indikator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan							
PROGRAM	Pengumpulan,			9.677.000	39.080.000	500.345.000	533.143.000	570.727.000	607.338.000
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	Jumlah data yang tersedia		2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL	2 VARIABEL
PROGRAM	Pelembagaan			-	149.064.080	168.624.713	199.828.736	241.383.333	282.554.598
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat		4 INDIKATOR	5 INDIKATOR	7 INDIKATOR	8 INDIKATOR	10 INDIKATOR	12 INDIKATOR
	Penguatan dan			397.133.000	369.678.920	418.189.287	495.575.264	598.630.667	700.735.402
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan		7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS	7 JENIS

Dugguan	Vaciatan	Indikator	Target		Kera	nngka Pendanaar	ı Indikatif dan T	arget	
Program	Kegiatan	Indikator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kewenangan Kabupaten/Kota								
PROGRAM	Pencegahan			-	13.577.500	14.935.250	16.428.775	18.071.653	19.878.818
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan		30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD
	Penyediaan			210.399.803	525.990.000	406.434.526	456.225.796	525.632.701	578.195.971
	Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan		50 kasus	60 kasus	70 kasus	80 kasus	90 kasus	100 kasus
PROGRAM	Perencanaan,			15.890.609	17.744.349	19.996.109	23.436.658	27.596.800	32.302.814
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
				3.483.834.214	3.316.760.061	3.737.657.277	4.380.762.201	5.158.372.657	6.038.017.160

D	IV ' - 4	T. 191-4	Target		Kera	ngka Pendanaar	ı Indikatif dan T	arget	
Program	Kegiatan	Indikator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Administrasi			3.768.416	3.548.870	3.999.222	4.687.332	5.519.360	6.460.563
	Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan		55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang
	Administrasi			169.823.791	347.789.235	391.923.728	459.358.503	540.897.276	633.135.148
	Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi		11	30	30	30	30	30
	Penyediaan Jasa			952.508.821	901.178.691	1.015.538.366	1.190.272.879	1.401.553.152	1.640.556.537
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang tersedia		46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang
	Pemeliharaan			92.289.148	1.112.797.794	1.250.376.300	1.461.643.427	1.716.946.755	2.005.320.778
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia		4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis

Ducquan	Vaciator	Indikator	Target		Kera	ngka Pendanaar	ı Indikatif dan T	arget	
Program	Kegiatan	Indikator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM	Pemaduan dan			48.384.443	39.080.000	42.865.357	50.242.857	59.163.214	262.683.453
PENGENDALIAN PENDUDUK	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK		153 UNIT					
	Pemetaan			648.355.557	70.344.000	77.157.643	90.437.143	106.493.786	652.246.547
	Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data		2 DOKUMEN	1 DOKUMEN				
PROGRAM	Pelaksanaan			5.310.022.240	1.507.123.750	1.639.675.762	1.921.871.304	2.263.090.803	2.649.091.228
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi		18 BALAI PENYULUH					
	Pendayagunaan			628.968.635	592.418.474	644.521.868	755.446.967	889.573.137	1.041.301.741
	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi		18 BALAI PENYULUH					
	Pengendalian dan			958.032.545	2.014.536.278	2.191.715.384	2.568.919.416	3.025.019.362	3.540.976.899
	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani		2500 AKSEPTOR	2600 AKSEPTOR	2600 AKSEPTOR	2700 AKSEPTOR	2700 AKSEPTOR	2800 AKSEPTOR

D	W	Tu 191-4	Target		Kera	ngka Pendanaar	ı Indikatif dan T	'arget	
Program	Kegiatan	Indikator	awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan			737.758.579	694.886.498	756.001.986	886.113.313	1.043.438.698	1.221.411.133
	dan Peningkatan			131.138.319	094.000.498	/30.001.980	000.113.313	1.045.456.098	1.221.411.133
	Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung KB yg berkontribusi thdp pembangunan di wilayahnya		53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB	53 KAMPUNG KB
PROGRAM	Pelaksanaan			2.316.338.000	2.074.503.000	2.275.448.000	2.667.062.000	3.140.587.000	3.676.256.000
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.		7 UNIT					

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur No. Per/20/Menpan/11/2008 sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan/atau sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (2) bahwa Sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian penetapan indikator sasaran RPJMD menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja intansi maka Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	In dilector	Cotuon	Kondisi Awal		Target	Capaia	n Setiap	Tahun		Target
No	Indikator	Satuan	Tahun ke-0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD
1	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	%	Belum Tersedia	2	4	6	8	10	10	10
2	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	%	Belum Tersedia	10	15	20	25	30	30	30
3	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,92 (Th 2019)	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2	1,9-2
4	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	%	76	70- 76	70- 76	70- 76	70- 76	70- 76	70- 76	70-76
5	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	%	16,45	12,1 5	Men urun	Men urun	Men urun	Men urun	Men urun	Menurun
6	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	Belum Tersedia	70	80	90	100	100	100	100
7	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	Belum Tersedia	70	80	90	100	100	100	100
8	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	level	0	Leve 11	Leve 11	Leve 12	Leve 12	Leve 12	Leve 13	Level 3

BAB VII PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

- Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
- 2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- 3. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman

- pada Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian targettarget Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MATRIES PROGRAM, REGIATAM, DAN SUB KEGIATAM RANCANGAN AHRIR RENCANA STRATEGIS DINAS KELUABGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK KABUPATEN GRESIK

												KABUPA	TEN GRESIK																		
Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020			Target			Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Indikator	Baseline 2020		2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				2021	2022 2	023 202	2025	2026	Ì	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAI			Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM E	lidang Catatan
										DINAS KELUARGA BERENCANA,																					
										PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK																					
									2 8	PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				23,352,420,438			32,695,477,793			35,743,009,298			39,276,596,245			43,178,178,395			47,605,941,935		
Meningkatkan kualitas dan	Persentase	jumlah desa yang sudah	Belum	2%	4%	6%	8% 10	0% 10%	2 8 2	PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	Persentase Usulan Perempuan	0	N/A	759,599,482	735,061,000	15%	824,317,358	644,284,000	20%	906,749,094	706,692,000	25%	997,424,003	861,477,000	30%	1,097,166,403	975,381,000	35%	1,206,883,044	684,669,000	
aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	keterlibatan perempuan di	mengakomodasi usulan perempuan di	Belum Tersedia							PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD																				
	proses pembangunan	perempuan di musrenbang desa (dibuktikan dalam berita									dan Forum OPD																				
	desa	acara musrenbangoes) /																													
		mengadakan musrenbang desa																													
		(sumber data: dkbpppa)																													
		(затоет анаг. акоррра)							2 8 2 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan	Jumlah OPD yang telah	0	S OPD	100,000,000	96,769,550	10	200,000,000	156,319,406	15	220,000,000	171,461,147	30	242,000,000	209,015,858	45	266,200,000	236,651,816	SS	292,820,000	166,117,817	
										Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya																				
									8 2 2.01	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	0	55	100,000,000	96,769,550	55	200,000,000	156,319,406	55	220,000,000	171,461,147	55	242,000,000	209,015,858	55	266,200,000	236,651,816	55	292,820,000	166,117,817	
											Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender																				
											(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota																				
									2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan	55	15 DESA	509,599,682	1,095,667,785	17 DESA	424,317,358	331,645,187	30	466,749,094	363,769,705	45	513,424,003	443,445,284	50	564,766,403	502,077,367	65	621,243,044	352,433,366	
										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes																				
				Ħ					2 8 2 2.02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	15	4	209,599,720	450,651,107	4	94,317,358	73,718,167	1	103,749,094	80,858,812	1	114,124,003	98,569,118	1	125,536,403	111,601,870	1	138,090,044	78,338,968	
										Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																					
											Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan																				
											Kabupaten/Kota																				
			1	ΙĪ					2 8 2 2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan	0	17	299,999,962	645,016,678	17	330,000,000	257,927,020	17	363,000,000	282,910,893	17	399,300,000	344,876,166	17	439,230,000	390,475,497	17	483,153,000	274,094,398	
										Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pendampingan Kebijakan Regioekstan Participari																				
											Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																				
									2 8 2 2.03	Penguatan dan Pengembangan	Jumlah Lembaga / kelompok	564	10	149,999,800	145,154,131	10	200,000,000	156,319,406	10	220,000,000	171,461,147	10	242,000,000	209,015,858	10	266,200,000	236,651,816	10	292,820,000	166,117,817	
									2 8 2 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	masyarakat yang difasilitasi		LEMBAGA			LEMBAGA															
									2 8 2 2.03	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah sumber Daya Lembaga	10	475	149,999,800	145,154,131	675	200,000,000	156,319,406	475	220,000,000	171,461,147	475	242,000,000	209,015,858	475	266,200,000	236,651,816	475	292,820,000	166,117,817	
										Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan																				
										Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan																				
Peningkatan inklusivitas penyandang	Persentase	(jumlah kasus yang	Belum	70	80	90	100 10	100	2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Karasistas Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan		96%	754,912,922	585,372,000	96%	650,773,000	689,422,000	96%	670,988,500	709,057,000	96%	693,225,550	780,854,000	96%	717,686,305	865,714,000	96%	854,400,636	956,146,000	
disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang	kasus kekerasan terhadap	mendapat layanan komprehensif/ jumlah kasus yang dilaporkan	Tersedia							PEREMPUAN	Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan																				
komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang		kasus yang dilaporkan)*100%																													
efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi	yang mendapat	(sumber data: dkbpppa)																													
dan peningkatan kesempatan kerja	layanan komorehensif																														
									2 8 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan. Jumlah Dokumen Hasil	95.79831933	30 OPD	-		30 OPD	17,155,000	18,173,825	30 OPD	18,870,500	19,941,117	30 OPD	20,757,550	23,381,446	30 OPD	22,833,305	27,542,830	30 OPD	25,116,636	28,107,623	
										1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	pencegahan kekerasan.						17.155.000	18.173.825		18.870.500	19,941,117		20.757.550	23.381.446		22,833,305	27.542.830		25.116.636	28,107,623	
									2 8 3 2.01	Kebijakan, Program dan Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program		3			10	17,155,000	18,173,825	10	18,870,500	19,941,117	10	20,757,550	23,381,446	10	22,833,505	27,542,830	10	25,116,636	28,107,623	
										Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dan Kegiatan Pencegahan																				
										Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan			6						6	50,000,000		6	50,000,000		6	50,000,000		6	50,000,000		DAK PPA
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan																				
											Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
									2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan hasi Perempuan Korban Kebasasa	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil diselesaikan	belum pernah dihitung	115 KASUS	604,913,122	469,059,667	115	458,618,000	485,855,035	115	459,618,000	485,694,405	115	460,718,000	518,955,906	115	461,928,000	557,203,800	115	463,259,000	518,425,691	
										Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Berhasil diselesaikan	- Smitting																			
				F					2 8 3 2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban	114	115	604,913,122	469,059,667	115	448,618,000	475,261,141	100	448,618,000	474,070,320	100	448,618,000	505,326,383	100	448,618,000	541,148,522	100	448,618,000	502,041,183	
									3,202		Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	114	115	w-,713,122	-u,,usa,e6/	115	,010,UUU	47.5,201,141	100	,010,000	~,~,u/u,320	100	,010,000	July 320,363	100	****,010,000	J-1,140,322	100	~~u,010,000		
										Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Mendapatkan Layanan Peneaduan																				
				Ħ					2 8 3 2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaar Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	Pengaduan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan	7	0			20	10,000,000	10,593,894	20	11,000,000	11,624,084	20	12,100,000	13,629,523	20	13,310,000	16,055,278	20	14,641,000	16,384,507	
										Penyediaan Layanan Kujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasa																				
											Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga / kelompok																				
									2 8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pennyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabusaten/Kofa 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kokerasan Kewenangan Kabupaten/Kot.	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi		10 LEMBAGA	149,999,800	145,154,131	10 LEMBAGA	175,000,000	185,393,140	10 LEMBAGA	192,500,000	203,421,478	10 LEMBAGA	211,750,000	238,516,648	10 LEMBAGA	232,925,000	280,967,370	10 LEMBAGA	366,025,000	409,612,686	
										Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
									2 08 03 2.03	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan		95 orang	149,999,800	116,312,333	95	75,000,000	79,454,203	95	82,500,000	87,180,633	95	90,750,000	102,221,421	95	99,825,000	120,414,587	95	219615000	245,767,612	
										Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan																				
											Rabupaten/Kota yang Mendapat Booloekatan Kanacitar																				
-	-		1	\vdash			+	+	2 8 3 2.03	3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100,000,000	105,938,937	100	110,000,000	116,240,845	100	121,000,000	136,295,227	100	133,100,000	160,552,783	100	146,410,000	163,845,075	_
										Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																				
										Kabupaten/Kota	yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan																				
											Spesifik																				
Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak vatim	Persentase kasus anak	(jumlah kasus yang mendapat layanan	Belum Tersedia	70	80	90	100 10	100	2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada			9,999,911	9,677,000	50%	30,000,000	39,080,000	60%	33,000,000	500,345,000	70%	36,300,000	533,143,000	80%	39,930,000	570,727,000	90%	43,923,000	607,338,000	
dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang	dalam situasi	komprehensif/jumlah kasus yang dilaporkan)*100%									Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada Indikator PermenPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak																				
program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem	h khusus yang mendapat layanan										Penyelenggaraan Data Gender dan Anak																				
pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja	komprehensif	(sumber data: dkbpppa)																													

Part	Sacaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020		Target			Kode Rekenin	g Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Baseline 2020		2021			2022		2023			2024			2025			2026		
The content will be content					2021 2022	2023 202	24 2025	2026		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YAN- BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAS	G AR		Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM T	arget Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Bidang Catatar
								2	8 5 2.01			0	2 VARIABEL	9,999,911	9,677,000	2 VARIABEL	30,000,000	39,080,000 VA	2 33,000,00 RIABEL	500,345,00	00 2 VARIABEL	36,300,000	533,143,000	2 VARIABEL	39,930,000	570,727,000	2 VARIABEL	43,923,000	607,338,000	
					+++	4		2	8 5 2.01	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Penyajian dan		1	9,999,911	9,677,000	1	30,000,000	39,080,000	1 33,000,00	0 500,345,00	10 1	36,300,000	533,143,000	1	39,930,000	570,727,000	1	43,923,000	607,338,000	
Series Se					i					Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak dalam Kelembagaan Data di																		1	
STATE	Peningkatan inklusivitas penyandang	Persentase	(jumlah kasus yang	Belum	70 80	90	100 100	100 2	8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Nilai Klaster Kelembagaan pada		114%	199,990,650	397,133,000	120%	435,000,000	518,743,000 1	30% 478,500,00	586,814,00	00 140%	526,350,000	695,404,000	140%	578,985,000	840,014,000	140%	636,883,500	983,290,000	
State Stat	dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan	dalam situasi khusus yang	komprehensif/jumlah kasus yang dilaporkan							(*****)	Layak Anak																			
		mendapat layanan komorehensif																												
Company	dan peningkatan kesempatan kerja							2	8 6 2.01	Pelemhagaan PHA nada Lemhaga	kumlah Indikator KI & vans telah	114	4			5	125 000 000	149 054 080	7 137 500 0	168 624 71	13 8	151 250 000	199 828 736	10	166 375 000	241 383 333	12	183.012.500	282 554 598	
Company										Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	ditindaklanjuti oleh OPD/ / Perusahaan / Lembaga		INDIKATOR				,,							_						
								2	8 6 2.01	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	n Jumian Organisasi Pemerintan, Non Pemerintah, Media dan	4 organisasi	0	-		82	75,000,000	89,438,448	82 82,500,00	0 101,174,82	8 82	90,750,000	119,897,241	82	99,825,000	144,830,000	82	109,807,500	169,532,759	
Part										dan Dunia Usaha Kewenangan	Advokasi Kebijakan dan																		ı	
					i						Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,																		1	
								2	8 6 2.01	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi	0	N/A	-		4	50,000,000	59,625,632	4 55,000,00	0 67,449,88	5 4	60,500,000	79,931,494	4	66,550,000	96,553,333	4	73,205,000	113,021,839	
											Anak Kewenangan																		I	
Column C								2	8 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan		7 JENIS	199,990,650	397,133,000	7 JENIS	310,000,000	369,678,920 7	JENIS 341,000,00	10 418,189,28	7 JENIS	375,100,000	495,575,264	7 JENIS	412,610,000	598,630,667	7 JENIS	453,871,000	700,735,402	
Part						+		2	8 6 2.02		Jumlah Anak yang Mendapatkan Jayanan		N/A	199,990,650	397,133,000	100	210,000,000	250,427,655	100 231,000,00	0 283,289,51	7 100	254,100,000	335,712,276	100	279,510,000	405,524,000	100	307,461,000	474,691,724	
Column C										Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan																			
Part								2	8 6 2.02	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak ba	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi gi Informasi dan Edukasi (KIE)	0	N/A			5	100,000,000	119,251,264	7 110,000,00	0 134,899,77	7 7	121,000,000	159,862,989	7	133,100,000	193,106,667	7	146,410,000	226,043,678	
Column C										Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peninskatan Kualitas Hidup Anak																			
	Peningkatan inkluduktur panusadaan	Persentace	firmlah kasus yang	Belum	70 . 90	90	100 100	100 3	* 7	PROGRAM PERLINDINGAN PURPLE	Kewenangan Kabupaten/Kota		1006	210,200,903	210 200 203	1000	539 567 509	539 567 500	100%431.260.33	6 421 260 77	16	477,554.574	477 654 574	100%	543 204 253	543,204,253	100%	598,074,790	508,074,790	
Column C	dan anak-anak terlantar yang	dalam situasi	mendapat layanan komprehensif/jumlah	Tersedia				100 2		ANAK	Terhadap Anak Yang Berhasil Diselesaikan		1000	210,599,805	220,333,603	100%	333,100,100	033,307,300	421,509,71	421,303,77	100%	472,034,571	472,054,571	100%	343,704,353	343,704,353	100%	230,074,769	330,074,769	
Mary	komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem	mendapat	kasus yang dilaporkan)*100%																											
	pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja	komprehensif	(sumber data: dkbpppa)																											
								2	8 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Ana yang Melibatkan Para Pihak lingkup	k Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan		30 OPD			30 OPD	13,577,500	13,577,500 30	OPD 14,935,25	0 14,935,25	30 OPD	16,428,775	16,428,775	30 OPD	18,071,653	18,071,653	30 OPD	19,878,818	19,878,818	
Property Company of the Company of						_		2	8 7 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahi	pencegahan kekerasan an Jumlah Dokumen Hasil		3	0	0	12	13,577,500	13,577,500	3 14,935,25	0 14,935,25	0 3	16,428,775	16,428,775	3	18,071,653	18,071,653	3	19,878,818	19,878,818	
Column C					i						Pencegahan Kekerasan Terhadap																		1	
Column C								2	8 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerluk se Berlindungan Khurur ya	Make and an Area		50 kasus	210,399,803	210,399,803	60	525,990,000	525,990,000	70 406,434,53	406,434,52	16 80	456,225,796	456,225,796	90	525,632,701	525,632,701	100	578,195,971	578,195,971	
Second Column Col										Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Diselesaikan																			
								2	8 7 2.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	dihitung	100	210,399,803	210,399,803	100	405,990,000	405,990,000	100 274434529	.7 274,434,52	100	311025795.7	311,025,796	100	365912700.9	365,912,701	100	402503971	402,503,971	
Processing and proc					i						Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	khusus																	1	
Column C								2	8 7 2.02	Pendampingan Anak yang Memerluka	n Pengaduan yang Memerlukan	N/A	0			20	20,000,000	20,000,000	20 22,000,00	0 22,000,00	10 20	24,200,000	24,200,000	20	26,620,000	26,620,000	20	29,282,000	29,282,000	
					i					Kabupaten/Kota	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus																		1	
Comparison Com								2	8 7 2.02	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak		0			5	100,000,000	100,000,000	5 110,000,00	0 110,000,00	00 S	121,000,000	121,000,000	5	133,100,000	133,100,000	5	146,410,000	146,410,000	
Part										Perlindungan Khusus Kewenangan	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan																			
Part	Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak vatire	Tingkat Kematangan	Dihitung mandiri menurut standar SPRF	0	level 1 level 1	level 2 level	2 level 2 le	evel 3 2	14 1	PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAFRAH	Persentase Program OPD yang		100%	6,235,036,489	4,718,115,000	100%	8,030,470,830	5,699,819,000 1	.00% 8,828,517,9	3 6,419,491,00	100%	9,706,369,704	7,520,161,000	100%	10,672,006,675	8,850,886,000	100%	11,734,207,342	10,355,793,000	
Company of the Comp	dan anak-anak terlantar yang		and an area							KABUPATEN/KOTA																				
2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3	efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi																													
	dan peningkatan kesempatan kerja							2	14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,		5	20,999,600	15,890,609	5	25,000,000	17,744,349	5 27,500,0	0 19,996,10	19 5	30,250,000	23,436,658	5	33,275,000	27,596,800	5	36,602,500	32,302,814	
Paraglat Data Paraglat Dat								,	14 12.01		Penganggaran dan Evaluasi Kineria	5				dokumen														
2 14 1 2.02 Administrating Recognition From Processing Recognition From Proc						\perp		Į,	14 1 201	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	1												17						
2 14 1 2.00 1 Perspelluan Gay dan Traipregan ASS AND Code young Teach Improvemental Configuration (Code of the Code of the Cod											Kinerja Perangkat Daerah	1	12			12								12			12			
Training and Administrati Engagement in Persignal Substitution Training and Administration Training and Admini												12	12	4,603,922,000	3,483,834,214	12	4,672,980,830	3,316,760,061	27 5,140,278,91	3 3,737,657,27	7 26	5,654,306,804	4,380,762,201	26	6,219,737,485	5,158,372,657	26	6,841,711,233	6,038,017,160	
2 24 1 20 21 Imministrating representation in implementation in implemen											Tunjangan ASN Jumlah peserta pembinaan		55	4.980.000		55			55 5.500 m			6.050.000	4,687.332	55	6.655.0nn					
2 14 1 205 11 Sembergan Tearnis Inglementation (International Section (Internation										Daerah			- 3	.,300,000	-,700,-10		2,000,000	3,2 4,070	3,330,0	3,553,22		3,030,000	.,007,332		.,,0	-,0-0,000		.,320,300	2,400,203	
Petrolium Previous (Modernian Previous Previous Previous Previous Previous Previous Previous Pre								2	14 1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	55	55	4,980,000	3,768,416	55	5,000,000	3,548,870	55 5,500,00	0 3,999,22	2 55	6,050,000	4,687,332	55	6,655,000	5,519,360	55	7,320,500	6,460,563	
2 14 1 2 26 1						_					Peraturan Perundang-Undangan	55	11	224,423,850	169,823,791	30	490,000,000	347,789,235	30 539,000,0	391,923,72	18 30	592,900,000	459,358,503	30	652,190,000	540,897,276	30	717,409,000	633,135,148	
Notify reviewing the Registerial National Society of Conference of Confe											Listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang ternenuhi																			
Kantor yang Diserlakan								2	14 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11	8	3,999,624	3,026,556	15	20,000,000	14,195,479	15 22,000,00	0 15,615,02	7 15	24,200,000	17,176,530	15	26,620,000	18,894,183	15	29,282,000	20,783,601	
2 14 12.06 2 Pempedian Penalatan dan Peningkapan Jumbah Palet Penalatan dan 3 3 15,773,000 14,962,429 15 100,000,000 79,977,395 15 110,000,000 78,075,134 15 122,000,000 58,882,648 15 133,000,000 94,470,913 15 146,410,000 103,918,004					\dashv	+	+	2	14 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkap	Kantor yang Disediakan an Jumlah Paket Peralatan dan	3	3	19,773,000	14,962,429	15	100,000,000	70,977,395	15 110,000,00	0 78,075,13	4 15	121,000,000	85,882,648	15	133,100,000	94,470,913	15	146,410,000	103,918,004	
Cantor Pedenglapan Kintor yang Diodesian Diodesian Divided Divid				1	. 1				111	Kantor	Perlengkapan Kantor yang	1							1	1	1	1					1			
Rantor yang					'	-+		2	14 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	5	5	99,985,621	75,660,128	5	150,000,000	106,466,092	10 165,000.00	0 117,112.70	12 10	181,500,000	128,823,972	10	199,650,000	141,706,369	10	219,615,000	155,877,006	

	Sasaran Indikator	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020		Target			Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Indikator	Baseline 2020		2021		2022			2023			2024			2025		21	126	
				2021 2	2022 2023 2024	2025 2	2026		Daerah/Program URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG RERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Target	Rp	RPJM	Target Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM T:	rget Rp	RPJM	Bidang Catata
							2	14 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		6	9.232.605	6,986,405	6 10,000,00	7,097,739	8	11,000,000	7,807,513	8	12,100,000	8,588,265	8	13,310,000	9,447,091	8 14,64	1,000 10,391,80	
Part								44 4 200		yang Disediakan	,		0.450.000	C 401 767	7 40 000 00	7,007,730	1000	11 000 000	7007543	1000	43.400.000	0.000.300	1000	13.340.000	0.447.001	1000 14.54	1000 1000	
							2	14 1230	Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	,	1	8.460.000	6,401,767	7 10,000,00	7,097,739	1900	11,000,000	7,807,513	1900	12,100,000	0,560,205	1900	13,310,000	5,447,051	1900 14,64	1,000 10,391,800	1
Part							2	14 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan	4	491	82.973.000	62,786,506	600 200.000.000	141,954,790	600	220,000,000	156,150,269	600	242,000,000	171,765,296	600	266,200,000	188,941,825	600 292,82	0,000 207,836,00	8
March Marc							2	14 1 2.08		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491	46 orang	1 258 750 000	952 508 821	46 orang 1 269 670 00	0 901 178 691	1 46 orane	1 396 637 000	1 015 538 366	46 orang	1 536 300 700	1 190 272 879	46 orang	1 689 930 770	1.401.553.152 46.	orane 1.858.97	3 847 1 640 556 53	7
							2	14 1 2.08	Pemerintahan Daerah 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	tersedia Jumlah Laporan Penyediaan	3	3					3			3			3					.6
											,	42	4 440 770 000	000 070 000	43 4 440 770 00	010 030 044		4 354 505 000	007 543 700	42	1 300 000 000	007.353.030	42	4 530 054 050	1.007.000.337	42 4 500 00		
										Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	43					* *3			43			43					1
1							2	14 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	43	4 jenis	121,961,039	92,289,148	4 jenis 1,567,820,00	0 1,112,797,794	4 4 jenis	1,719,602,000	1,250,376,300	4 jenis	1,886,562,200	1,461,643,427	4 jenis	2,070,218,420	1,716,946,755 4	enis 2,272,24	0,262 2,005,320,77	8
March Marc							2	14 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Romoliharaan dan Balak Kondaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan	1	1	41,242,290	31,208,457	1 100,000,00	0 70,977,395	1	110,000,000	78,075,134	1	121,000,000	85,882,648	1	133,100,000	94,470,913	1 146,41	0,000 103,918,00	4
									Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan																		
							2	14 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	30	29,624,025	22,416,799	30 100,000,00	0 70,977,395	9	110,000,000	78,075,134	30	121,000,000	85,882,648	30	133,100,000	94,470,913	30 146,41	0,000 103,918,00	4
									Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
							2			Bangunan Lainnya	3	2	24,911,000	18,850,405	3 1,317,820,00	935,354,307	7 3	1,449,602,000	1,028,889,737	3	1,594,562,200	1,131,778,711	3	1,754,018,420	1,244,956,582	3 1,929,42	0,262 1,369,452,240	5
Market State Company of the Company				++	+		2			yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana	5	5	26,183,724	19,813,488	5 50,000,00	0 35,488,697	5	50000000	35,488,697	5	50000000	35,488,697	5	50000000	35,488,697	5 500	00000 35,488,69	7
Column C									Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan																		
Column C	Peningkatan peran dan fungsi keluarga Total Fertility dalam pembangunan Daerah, inisiasi Rate	TFR (BPS, Publikasi : GDA)	1,92 (2019)	1,9-2	1,9-2 1,9-2 1,9-2	1,9-2	1,9-2 2	14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program		100%	719,999,366	696,740,000	100% 140,000,00	0 109,424,000	100%	154,000,000	120,023,000	100%	169,400,000	140,680,000	100%	186,340,000	165,657,000 1	254,97	4,000 914,930,00	0
Column C	nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter									KKBPK																		
Column C								14 2 20	Domaduan dan Cinkronicari V-h ¹⁰ -h-1	humlah Hait Rombori Lava	halum nam sh	152 UNIT	49 999 (77	49 294 443	152 50 000 00	0 29.090 000		55 000 000	42 965 272	162	50 500 000	50 242 073	162	66 550 000	59 162 214		5 000 363 603 40	
Company							2	24 2 2.01	Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK	dihitung	155 UNII	49,667	40,554,443	255 50,000,00	59,080,000	153	55,000,000	42,865,357	193	60,500,000	50,242,857	153	00,550,000	39,163,214	/3,20	262,683,45	
Company									dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																			
							2	14 2 2.01		Jumlah Dokumen Penyediaan	belum pernah	1	49,999,667	48,384,443	1 50,000,00	39,080,000	1	55,000,000	42,865,357	1	60,500,000	50,242,857	1	66,550,000	59,163,214	1 73,20	5,000 262,683,45	3
									Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Secual Isr	ainitung																	
The contract of the contract		<u> </u>	<u></u>	Ш						Lokal Kabupaten/Kota							<u></u>											
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							2	14 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Jumlah Dokumen Data	2	2 DOKUMEN	669,999,699	648,355,557	1 90,000,00	0 70,344,000	1	99,000,000	77,157,643	1	108,900,000	90,437,143	1	119,790,000	106,493,786	52 181,76	9,000 652,246,54	,
Column C							2	14 2 2.02	3 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Keluarga	1	50	29,999,878	29,030,741	50 30,000,00	23,448,000	50	33,000,000	31,933,945	50	36,300,000	35,127,339	50	39,930,000	38,640,073	50 43,92	3,000 42,504,08	1
			<u></u>						Keluarga	Berencana dan Pembangunan Keluarga							<u></u>											
				ΙŢ		П	2	14 2 2.02	9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	30	16	19,999,872	19,353,782	0	-	. 0	0		0	0	-	0	0		1 50,00	0,000 48,384,76	ذ
		1		\vdash			- 1	14 2 2 02			1		619,999 9,40	599.971 n>c	1 60 000 00	0 46.896.000		66 nnn nno	63,867 80n		72.600.000	70.254.620		79,860,000	77.280 146	1 27 04	5.000 R5.00P 16	4
	Peningkatan peran dan fungsi keluarga CPR	Contraceptive	76	70-76	70-76 70-76 70-76	5 70-76	70-76 2	14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Keluarga yang Tersedia Unmet Need ber-KB	1	11%	11,408,316,910	7,634,782,000	10.5% 7,629,163,94	5 4,808,965,000	10%	8,392,080,340	5,231,915,000	9.6%	9,231,288,373	6,132,351,000	9%	10,154,417,211	7,221,122,000 8	5% 11,169,83	8,932 8,452,781,00	0
Company Comp	dalam pembangunan Daerah, inislasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan	Prevalency Rate (Jumlah PA KB / PUS)							BERENCANA (KB)																			
Company Comp	pembriaan karakter	100%					-	14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikari	Jumlah Balai Pensukih yang	0.1148	18 BAI AI	7,934,531 270	5,310 022 240	18 2 390 970 50	0 1.507 123 750	10	2,630 067 715	1,639 675 767	18	2,893 074 497	1,921,871 304	12	3.182,321 920	2,263,090 803	18 3 500 61	0.129 2.649.091.22	2
Substitution Subs									Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	terfasilitasi		PENYULUH	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,22,022,240	2,330,370,63	2,227,223,730		2,22,000,115	-,,0/3,-02		-,,,,	-,,07 4,004	ď	-,,,-35	,	3,303,63	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Image Imag							2	14 3 2.01		Jumlah Organisasi yang	18	18	49,999,970	33,461,454	18 50,000,00	0 31,516,986	32	55,000,000	34,668,684	32	60,500,000	38,135,553	32	66,550,000	41,949,108	32 73,20	5,000 46,144,019	9
									Staxeholders dan Mitra Kerja	Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kenendudukan dan																		
										Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Keria																		1
Page		1		\vdash			\dashv		Komunikasi, Informasi dan Edukasi	bootek Datomas Kamosthad		1		-	1	- 25,000,000	1	25,000,000		1	25,000,000		1	25,000,000	-	1 25,00	0,000	++-
No.									(KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana																		1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										rembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan																		
Integration of the Proposition Service (1) Integration of the Proposition Service (1) Integration of the Proposition Service (1) Integration		1		++			2	14 3 2.01	3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE	Budaya Lokal Jumlah Unit Sarana Penyediaan	18	18	1,360,690,650	910,614,297	18 1,360,690,65	0 857,697,352	2 18	1,496,759,715	943,467,087	18	1,646,435,687	1,037,813,796	18	1,811,079,255	1,141,595,175	18 1,992,18	7,181 1,255,754,69	3
									Program KKBPK	dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan																		
Mode da Adeas Crista des Extensive stats Michael Marian Michael Mari																												1
Principality April Apr									Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta	KIE Program Bangga Kencana		N/A		-	18 70,640,00		- 18	70,640,000		18	70,640,000	-	18	70,640,000	-	18 70,64	0,000	
Catal Acts Retrook arts Media Language Reviews Plantonia Management Retrook arts Media Language Reviews Plantonia Management Retrook arts Media Language Reviews Plantonia Management Retrook									Media Luar Ruang	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga																		
										Cetak dan Elektronik serta Media																		1
Mont Lateracy (ministry) Relating (intercent) Relat				\vdash			-1	HH	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Jumlah Laporan Mekanisme		0			18 280,800,00	0 -	- 18	234,000,000		18	250,000,000		18	250,000,000	-	18 250,00	0,000	+
Mode Last Series (Ministrative) (Min									Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan							1											
Paid and Continued Paid an									Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana) Melalui																		
										Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini																		
		1		++			2	14 3 2.01	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di	Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Hasil	0	18	6,523,840,650	4,365,946,490	18 980,280,00	0 617,909,412	2 18	1,078,308,000	679,700,354	18	1,186,138,800	747,670,389	18	1,304,752,680	822,437,428	18 1,435,22	7,948 904,681,17	1
									Balai Penyuluhan KXBPK	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan																		
Progressian Program ISBPC Aumidu Lapone Heal 0 0 0 N. N/A 40,000,000 - 18 40,0										Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																		
2 14 3 2.02 Pendingsprans Tenigr Propublish Registration (Program State Propublish Registration (Program State Propublish Registration (Program State Program St		-		++			+	++-	Pengendalian Program KKBPK	humlah Lanoran Hasil	0	0			N/A 40,000,00	0 -	- 18	40,000,000		18	40,000,000		18	40,000,000		18 40,00	0,000	+ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										Pengendalian Program KKBPK		18 BALAI	939,840,000	628,968,635			4 18		644,521,868	18		755,446,967	18		889,573,137			1
Pedesaun (MVP) Pereggentian								14 22.02		terfasilitasi		PENYULUH	929 940 000	670 060 7	256 020 040 07	0 592 410 474	200	1.022.924.000	644 571 000	300	1 127 206 400	755 446 0-7	357	1 350 937 040	990 572 127	1 275 01	2744 1 041 201 74	
							2	a4 3/2/02	Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat		356	232,840,000	020,568,635	3300 933,840,00	392,418,474	356	1,033,824,000	044,521,868	356	1,137,205,400	/33,446,967	356	1,250,327,040	007,3/3,13/	1,5/6,01	2,041,301,74	1
Reduchahan Ast dan Obert Kombasperi Gilayani AKSEPTOR AKSEPT							2	14 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian	Pedesaan (IMP) Jumlah akseptor MKIP yang		2500	1,431,545,640	958,032,545	2600 3,195,953,29	5 2,014,536,278	B 2600	3,515,548,625	2,191,715,384	2700	3,867,103,487	2,568,919,416	2700	4,253,813,836	3,025,019,362 2		5,219 3,540,976,89	9
Durent supprass, ratio									Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	dilayani		AKSEPTOR			AKSEPTOR		AKSEPTOR			AKSEPTOR			AKSEPTOR		AKSI	PTOR		
									Daeran Kabupaten/Kota																			

Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020		Target			Kode Rekening	g Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Indikator	Baseline 2020		2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				2021 20	22 2023 2024	2025 2	2026		Daerah/Program URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG			Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM	Target	Rp	RPJM B	idang Catatan
							2	14 3 2.03	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	0.21	N/A	115,730,000	77,449,928	N/A	115,730,000	72,949,215	18	127,303,000	80,244,136	18	140,033,300	88,268,550	18	154,036,630	97,095,405	18	169,440,293	106,804,945	
									Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke																				
							2	14 3 2 03	3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Orang yang		2500	149,992,345	100,379,299	2500	1,914,400,000	1,206,722,344	2500	2 105 840 000	1,327,394,578	2500	2 316 424 000	1,460,134,036	2500	2,548,066,400	1,606,147,439	2500	2,802,873,040	1,766,762,183	
									Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi						.,,,,	-,,,		2,223,233,23	.,,,		.,,,,	4, 100, 200, 1000			-,,		2,000,000,000	4.04.00	
							2	14 3 2.03	6 Penyediaan Sarana Penunjang	Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Unit Sarana Penunjang		18	1,165,823,295	780,203,318	18	1,165,823,295	734,864,715	9 18	1,282,405,625	808,351,191	18	1,410,646,187	889,186,310	18	1,551,710,806	978,104,942	18	1,706,881,886	1,075,915,436	
									Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Pelayanan KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan		0			0			- 55	18,600,000		55	18,600,000		55	18,600,000		55	18,600,000		
									Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk																				
									Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Kampung KB yang					0			- 53	914.250.000		53	914,250,000		53	914,250,000		53	914,250,000		
									KKBPK di Kampung KB	Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Rangga																				
										Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di																				
							2	14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Kampung KB Jumlah kampung KB yang mencapai kategori Mandiri	0.21	53 KAMPUNG	1,102,400,000	737,758,579	53 KAMPIIN	1,102,400,000	694,886,491	B 53 KAMPIIN	1,212,640,000	756,001,986		1,333,904,000	886,113,313		1,467,294,400	1,043,438,698	53 KAMPIIN	1,614,023,840	1,221,411,133	
									Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan			KAMPUNG KB			KAMPUN G KB			KAMPUN G KB			G KB			KAMPUN G KB			KAMPUN G KB			
							2	14 3 2.04	3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Jumlah Kampung KB yang	57	57	1,102,400,000	737,758,579	57	1,102,400,000	694,886,498	3 117	1,212,640,000	756,001,986	117	1,333,904,000	886,113,313	117	1,467,294,400	1,043,438,698	117	1,614,023,840	1,221,411,133	
									KKBPK di Kampung KB	Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan																				
										Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di																				
Peningkatan peran dan fungsi keluarg dalam pembangunan Daerah, inisiasi	ga Persentase i Usia Kawin	Dihitung dan dipublikasi oleh	16.45	12.15 meni	urun menurun menurun r	nenurun mei	nurun 2	14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Kampung KB Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus	3	6,16	2,654,164,905	2,316,338,000	7%	4,416,185,160	2,074,503,000	0 8%	4,857,803,676	2,275,448,000	9%	5,343,584,044	2,667,062,000	10%	5,877,942,448	3,140,587,000	11%	6,465,736,693	3,676,256,000	
dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	Pertama dibawah 20 Tahun	https://pk.bkkbn.go.id/P K/Laporan/							(15)	mandirl.																				
							2	14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Keselahteraan	6.16	7 UNIT	2,654,164,905	2,316,338,000	7 UNIT	4,416,185,160	2,074,503,000	7 UNIT	4,857,803,676	2,275,448,000	7 UNIT	5,343,584,044	2,667,062,000	7 UNIT	5,877,942,448	3,140,587,000	7 UNIT	6,465,736,693	3,676,256,000	
									Kesejahteraan Keluarga	Ketuanga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana,																				
										difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.																				
							2	14 4 2.01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sarana Kelompok Keglatan Ketahanan dan	20	20	200,000,000	174,543,639	18	200,000,000	93,950,001	18	220,000,000	103,345,001	18	242,000,000	113,679,501	18	266,200,000	125,047,451	18	292,820,000	137,552,196	
									(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL. PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi																				
							2	14 4 2.01	3 Orientasi dan Pelatihan Teknis	Keluarga/UPPKS) yang tersedia Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola	1	374	49,999,900	43,635,822	374	50,000,000	23,487,500	374	55,000,000	25,836,250	374	60,500,000	28,419,875	374	66,550,000	31,261,863	374	73,205,000	34,388,049	
									Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,																				
									Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				
							2	14 4 2.01	4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan	748	748	100,000,000	87,271,819	748	100,000,000	46,975,000	748	110,000,000	51,672,501	748	121,000,000	56,839,751	748	133,100,000	62,523,726	748	146,410,000	68,776,098	
									PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan																				
							2	14 4 2.01	5 Penyediaan Biaya Operasional bagi	Pemberdayaan Ekonomi Keluarea/UPPKS) Jumlah Kader Penselola dan	2920	2920	1.868.685.160	1.630.835.536	2920	3.630.685.160	1.705.514.371	2920	3.993.753.676	1.876.065.808	2920	4.393.129.044	2.063.672.389	2920	4.832.441.948	2.270.039.628	2920	5.315.686.143	2.497.043.591	
									Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL PPPKS. PIK-R dan	Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKB RKI PPPKS PIK-R dan																				
									Pemberdayaan Ekonomi Keluama (URRYS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				
					\Box		2	14 4 2.01	6 Penyediaan Blaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	715	715	260,500,000	227,343,089	715	260,500,000	122,369,876	715	286,550,000	134,606,864	715	315,205,000	148,067,550	715	346,725,500	162,874,305	715	381,398,050	179,161,736	
								Ш	PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				
							2	14 4 2.01	7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	5	5	75,000,000	65,453,864	5	75,000,000	35,231,250	5	82,500,000	38,754,375	5	90,750,000	42,629,813	5	99,825,000	46,892,794	5	109,807,500	51,582,074	
									Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan																				
								14 4 200	8 Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi		ļ .	99,979,845	87,254,230		100,000,000	46,975,000		110,000,000	51,672,501		121,000,000	56,839,751	L.	133,100,000	62,523,726		146,410,000	68,776,098	
								***************************************	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan		1	23,272,645	01,434,230	1	100,000,000	40,973,000	1	110,000,000	31,072,301	1	121,000,000	30,639,/51	1	155,100,000	0z,3z3,/2b	1	140,410,000	00,770,038	
									Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana. Kelaniutusiaan serta																				
Meningkatkan kualitas dan	persentase	(Σ ((jumlah kegiatan	Belum	10	15 20 25	30	30 2	8 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Pengelolaan Keuangan Keluarga)		N/A	400,000,000	387,079,000	10%	10,000,000,000	7,815,969,000	10%	11,000,000,000	779,369,000	10%	12,100,000,000	830,456,000	10%	13,310,000,000	889,000,000	10%	14,641,000,000	946,028,000	
aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	keglatan yang dilengkapi dokumen ARG	yang dilengkapi ARG/ jumlah kegiatan di OPD)*100%)) / jumlah	Tersedia						KELUARGA	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya																				
	per OPD	OPD																												
		(Sumber data: dibpopa)					2	8 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan		N/A	400,000,000	387,079,000	16	10,000,000,000	7,815,969,000	16	11,000,000,000	779,369,000	16	12,100,000,000	830,456,000	16	13,310,000,000	889,000,000	16	14,641,000,000	946,028,000	
							2	8 04 2 01	dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat	kemiskinan Jumlah Laporan		16	400,000,000	387.079.000	16	10.000.000.000	7.815.969.000	16	11.000.000.000	779.369.000	16	12.100.000.000	830.456.000	16	13.310.000.000	889.000.000	16	14.641.000.000	946.028.000	
									untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk		10	***************************************	347,073,000	16		. ,023,003,000	10	_1,000,000,000			,200,000,000	030,430,000	16	23,320,000,000	000,000,000	10	,044,000,000	3-0,020,000	
				Ш						Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																				